

*Strategi Revitalisasi Permukiman Kumuh Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo*

**Strategi Revitalisasi Permukiman Kumuh Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo**

Moh. Alfin Dwi Rahmatullah

S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: mohalfin.21032@mh.unesa.ac.id

Dr. Muzayanah, S.T., M.T.

Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Sidoarjo memiliki peran sebagai daerah industri sedang hingga besar, karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan kota besar Surabaya. Kondisi tersebut tentunya mendorong banyaknya peningkatan penduduk di Sidoarjo, salah satunya di kelurahan Lemahputro. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut, tentu menjadikan beberapa area di Sidoarjo, salah satunya Lemahputro mengalami masalah dalam areanya, yakni permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan skor dan klasifikasi permukiman kumuh di Lemahputro, serta menentukan strategi untuk upaya revitalisasinya. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Lemahputro, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan spasial dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi pustaka, digitasi, dan variabel. Serta, teknik analisis data yang digunakan adalah pedoman teknis Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/2018 untuk melakukan skor dan penilaian permukiman kumuh, serta analisis SWOT untuk menentukan strategi revitalisasi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa di kelurahan Lemahputro yang termasuk kategori permukiman kumuh, yakni pada Zona 2 dengan skor 8 (kekumuhan rendah), Zona 4 dengan skor 22 (kekumuhan sedang), dan Zona 5 dengan skor 21 (kekumuhan sedang). Sebagian besar penyebab permukiman kumuh adalah kondisi jalan, ketidakteraturan bangunan, serta kondisi persampahan. Oleh karena itu, strategi SWOT harus fokus pada ketiga hal tersebut, meliputi peningkatan dan perbaikan prasarana jalan, penataan bangunan, hingga penyediaan sampah yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat, serta program yang diterapkan harus bisa memberikan solusi atas kondisi yang ada seperti kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat sampah.

Kata kunci: Lemahputro, Permukiman Kumuh, SWOT.

Abstract

Sidoarjo plays a role as a medium to large industrial area, due to its location bordering the major city of Surabaya. This condition naturally drives a significant increase in population in Sidoarjo, including in the Lemahputro sub-district. The increasing population has led to problems in several areas of Sidoarjo, including Lemahputro, namely slum settlements. This research aims to determine the score and level of slum settlements in Lemahputro, as well as to determine SWOT strategies for revitalization efforts. This research was conducted in the Lemahputro sub-district, Sidoarjo district, Sidoarjo Regency. This research uses a quantitative method with spatial and descriptive approaches. The data collection techniques used are observation, literature study, digitization, and variables. Additionally, the data analysis technique used is the technical guidelines of the Minister of Public Works and Housing Regulation No. 14/PRT/2018 to score and assess slum settlements, as well as SWOT analysis to determine revitalization strategies. This research found that in the Lemahputro village, areas categorized as slum settlements include Zone 2 with a score of 8 (low slum level), Zone 4 with a score of 22 (medium slum level), and Zone 5 with a score of 21 (medium slum level). The main causes of these slum conditions are road conditions, building irregularity, and waste management conditions. Therefore, the SWOT strategy must focus on these three aspects, encompassing the improvement and repair of road infrastructure, building arrangement/regularization, and the provision/improvement of waste management systems, supported by both the government and the community. Furthermore, implemented programs must be able to provide solutions for the existing conditions, such as raising public awareness about the importance of trash bins/proper waste disposal

Keywords: Lemahputro, Slums, SWOT

PENDAHULUAN

Persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia tentunya dikarenakan beberapa faktor. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar pasar dan pusat ekonomi terjadi di Pulau Jawa. Sebagai contoh, dilansir dari BPS per September 2024, jumlah industri mikro di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah industri kecil terbesar di Indonesia dengan jumlah diatas 50.000 industri kecil, yakni Jawa Timur (115.414 unit), Jawa Barat (56.736 unit), dan Jawa Tengah (51.887 unit).

Pertumbuhan dari sebuah kota sangat berhubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terjadi di kota tersebut. Terdapat beberapa pendorong terjadinya pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah tingginya angka migrasi atau perpindahan dari desa menuju kota yang biasa disebut dengan urbanisasi (Salim, H., 2023). Urbanisasi merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk dan tentu memberikan kontribusi pada perkembangan sebuah daerah, termasuk Sidoarjo. Dalam suatu wilayah, sektor perumahan dan pemukiman merupakan aspek yang krusial. Hal tersebut dikarenakan perumahan dan permukiman merupakan hal pokok yang mampu mendukung pembangunan sebuah wilayah yang memiliki keterkaitan dengan migrasi atau urbanisasi. Namun, urbanisasi tidak semata-mata memberikan dorongan terhadap pembangunan di wilayah tersebut, melainkan juga dapat memberikan dampak negatif seperti menurunnya kualitas lingkungan dalam wilayah tersebut (Dita, dkk., 2022).

Area kumuh adalah tantangan sekaligus masalah yang terus menerus terjadi (the endless problems). Dalam program pemerintah, yakni UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak hidup makmur lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat dan aman yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Akan tetapi, program yang diciptakan masih belum menjadi solusi tepat yang dapat mengentaskan permasalahan kawasan kumuh ini (Hariantono, 2017 dalam Akbar, M.R, dkk, 2019). Permasalahan kawasan kumuh ini, tentunya menjadi masalah yang dieluhkan oleh masyarakat karena ketidaknyamanan tempat tinggalnya. Ketidaknyamanan yang dirasakan dapat di representasikan dalam permasalahan lapangan kerja, kualitas lingkungan, maupun kondisi sosial masyarakat di dalam kawasan (Safarina, T.S, dkk, 2023).

Sidoarjo merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota besar Surabaya, tepatnya berada di sebelah selatan Kota Surabaya. Lokasi tersebut mendukung Sidoarjo menjadi daerah industri sedang-

besar. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023 di Sidoarjo terdapat 1.203 industri sedang-besar yang beroperasi. Sebagai daerah Industri, Sidoarjo menjadi daerah yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang datang ke Sidoarjo dari tahun ke tahun. Dilansir dari databooks, Sejak tahun 2021, jumlah penduduk Sidoarjo meningkat terus menerus hingga tahun 2024, dari angka 1,96 juta meningkat menjadi 2 juta jiwa. Peningkatan penduduk di Sidoarjo tersebut lebih besar dibandingkan daerah Industri besar lainnya, yakni Gresik yang mengalami peningkatan dari 2021 hingga 2024 sebesar 0,03 juta jiwa.

Kelurahan Lemahputro merupakan salah satu desa atau kelurahan yang ada di Sidoarjo, tepatnya di kecamatan Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo sendiri merupakan ibu kota kabupaten Sidoarjo. Dilansir dari BPS Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo memiliki luas sekitar 6000-an hektare. Dengan posisinya sebagai ibu kota Kabupaten Sidoarjo, tentunya Kecamatan Sidoarjo memiliki peran besar untuk kabupaten Sidoarjo, meliputi pusat pemerintahan seperti kantor bupati dan pusat perbelanjaan seperti pasar larangan. Kondisi tersebut menjadikan kecamatan Sidoarjo memiliki jumlah penduduk dan pemukiman serta perumahan yang sangat padat, salah satunya di kelurahan Lemahputro.

Dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diimplementasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dilansir dari radarsidoarjo, pada tahun 2021, melalui program KOTAKU, Sidoarjo telah berhasil menyelesaikan sekitar 43,40 hektare dari target awal 39,85 hektare kawasan bebas kumuh. Namun, hingga tahun 2022 kelurahan Lemahputro menjadi salah satu kelurahan yang masih belum terselesaikan permasalahan tentang kekumuhan ini. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sidoarjo melalui Heri Soesanto selaku Kepala Bappeda menyampaikan bahwa penuntasan kawasan kumuh yang masih ada akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (Perda).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kelurahan Lemahputro, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kelurahan Lemahputro memiliki luas sekitar 92 ha. Kelurahan Lemahputro terletak di 7.448 – 7.455 Lintang Selatan dan 112.7046 – 112.7058 Bujur Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan spasial dan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan spasial ini, menurut Yunus (2010) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif mempunyai tujuan untuk menunjukkan suatu fenomena melalui data yang bersifat angka serta memanfaatkannya secara

terstruktur dan terukur secara statistik maupun matematik. Pendekatan spasial bertujuan untuk mendalami sebuah peristiwa agar diperoleh pengetahuan atas peristiwa tersebut, salah satunya pengetahuan dalam menanggulangi suatu peristiwa. Metode ini digunakan dalam penelitian guna memperoleh tingkat kekumuhan dan lokasi atau area tingkat kekumuhan dari kelurahan Lemahputro.

Menurut samsu (2017), metode deskriptif menjadi bagian dari kelompok non-eksperimental yang mempunyai arti bahwa metode deskriptif merupakan bentuk pencarian fakta dengan pemberian makna yang tepat, mempelajari masalah yang terjadi, serta cara berlakunya suatu hal di dalam masyarakat, termasuk kausalitas antara kegiatan, sikap, hingga proses-proses yang sedang dilakukan dan pengaruh yang diberikan dari fenomena atau kondisi tersebut (Syahrizal, dkk, 2023). Metode deskriptif ini digunakan guna menggambarkan objek penelitian sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, sehingga objek tersebut dapat dijelaskan dan diperoleh informasinya dengan tepat dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Beberapa data yang dianalisis, meliputi kondisi jalan, kondisi bangunan, kondisi pengelolaan sampah, kondisi drainase, maupun kondisi pengamanan kebakaran akan dilakukan observasi dengan melakukan pengecekan maupun pengukuran langsung di lokasi penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data yang memang tidak ada di lapangan namun diperlukan dalam penelitian ini, seperti shapefile, ketentuan teknis suatu indikator, dan data pendukung lainnya.

3. Digitasi

Terdapat indikator yang menggunakan digitasi untuk mengetahui data yang ada, yakni jumlah bangunan dan keteraturan bangunan. Dikarenakan dengan digitasi, maka indikator tersebut dapat diketahui dengan jelas dan lebih akurat.

Data yang diperoleh akan dianalisis, kemudian hasil analisis digunakan untuk menilai variabel dan indikator sesuai kriteria dari penilaian permukiman kumuh. Teknik analisis yang digunakan yakni :

1. Analisa Tingkat Kekumuhan Kawasan

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai atau skor tingkat kekumuhan kawasan adalah analisa pembobotan, sumber dan teknik penilaian berdasarkan pedoman teknis

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh yang menjadi acuan dalam menentukan skor Penilaian Tingkat Kekumuhan. Dalam penelitian ini, menggunakan 5 aspek dengan 10 kriteria dari Peraturan PUPR No. 14/PRT/2018 tersebut, yakni :

No	Aspek	Kriteria
1	Kondisi Bangunan	Kepadatan Bangunan
		Ketidakteraturan Bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Persyaratan teknis jalan lingkungan
		Kualitas jalan lingkungan
3	Kondisi Drainase	Persyaratan teknis drainase
		Area tidak mampu mengalirkan limpasan air
4	Kondisi Persampahan	Persyaratan teknis tempat sampah
		Cakupan tempat sampah
5	Kondisi Proteksi / Pengamanan Kebakaran	Persyaratan teknis pengamanan kebakaran
		Cakupan pengamanan kebakaran

Sumber : Buku saku, Kementerian PUPR

2. Analisa SWOT

Analisa SWOT digunakan guna mengidentifikasi beberapa faktor sebagai upaya merumuskan strategi yang berhubungan dengan capaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Analisis SWOT ini menganalisis tentang beberapa indikator yakni Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Dari 4 indikator tersebut dapat menjadi strategi revitalisasi atau penanganan permukiman kumuh yang ada di lokasi penelitian. Melalui analisis SWOT ini juga dapat menghasilkan rancangan berbagai strategi dengan memanfaatkan Strengths (S) dan Opportunities (O), serta meminimalisir Weakness (W) dan Threats (T) yang terdapat di lokasi penelitian, sehingga penanganan hingga pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan optimal.

Internal Eksternal	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	Kekuatan yang dimiliki suatu area	Kelemahan yang dimiliki oleh suatu area
OPPORTUNITY (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
Peluang yang dimiliki oleh wilayah	Menggunakan kekuatan (S) untuk	Menangani kelemahan (W)

	memanfaatkan peluang (O)	menggunakan peluang (O)
THREATS (T) Ancaman yang dimiliki oleh wilayah	Strategi S-T Menggunakan kekuatan (S) untuk memitigasi ancaman (T)	Strategi W-T Meminimalisir kelemahan (W) dan memitigasi ancaman (T)

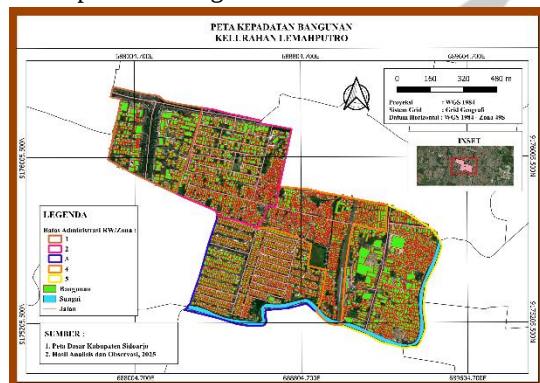
Sumber : Hasil analisis, 2025.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Bangunan

1.1. Kepadatan Bangunan



Gambar 1. Peta Kepadatan Bangunan

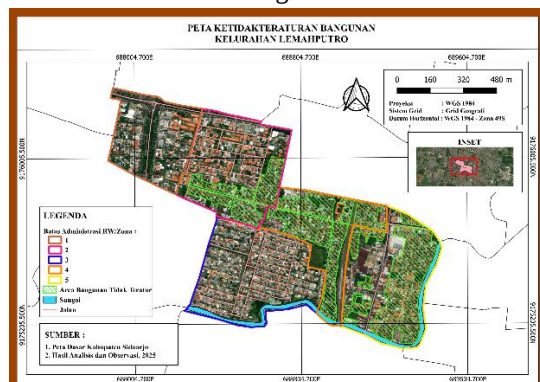
Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kepadatan bangunan dari setiap Zona sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	14 unit/ha	0
2	45 unit/ha	0
3	49 unit/ha	0
4	61 unit/ha	0
5	44 unit/ha	0

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

1.2. Ketidakteraturan Bangunan



Gambar 2. Peta Ketidakteraturan Bangunan

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor ketidakteraturan bangunan dari setiap Zona sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	0%	0
2	30%	1
3	0%	0
4	62%	3
5	59%	3

Sumber : Hasil analisis, 2025.

2. Kondisi Jalan Lingkungan

2.1. Persyaratan Teknis Jalan Lingkungan



Gambar 3. Peta Kesesuaian Teknis Jalan

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kondisi teknis jalan dari setiap Zona sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	-	0
2	20%	0
3	1%	0
4	84%	5
5	69%	3

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

2.2. Kualitas/Kondisi Jalan Lingkungan



Gambar 4. Peta Kualitas Jalan

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

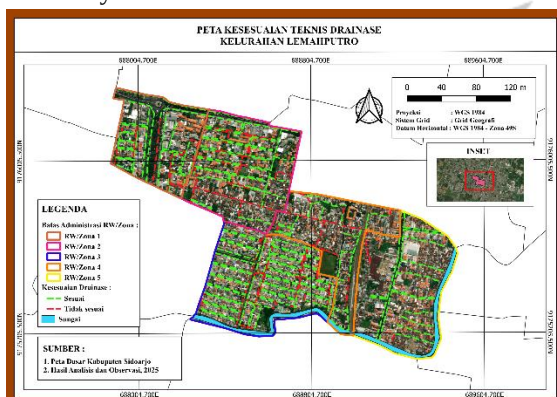
Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kualitas jalan dari setiap Zona sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	-	0
2	-	0
3	1%	0
4	-	0
5	-	0

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

3. Kondisi Drainase

3.1. Persyaratan Teknis Drainase



Gambar 5. Peta Kesesuaian Teknis Drainase

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kualitas konstruksi drainase dari setiap Zona yakni sebagai berikut :

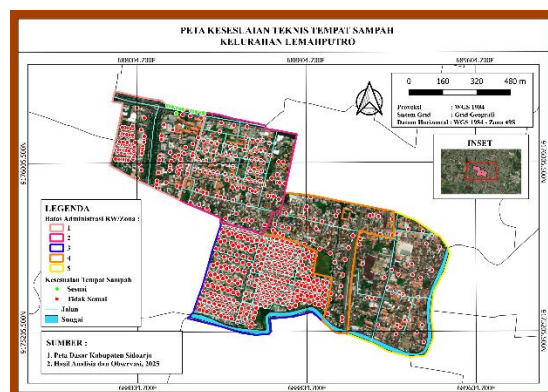
Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	23%	0
2	29%	1
3	19%	0
4	34%	1
5	6%	0

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

3.2. Area Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air (Keseluruhan Zona memiliki skor 0, karena tidak ada area yang mengalami genangan air atau tidak mampu mengalirkan limpasan air).

4. Kondisi Persampahan

4.1. Persyaratan Teknis Tempat Sampah



Gambar 6. Peta Kesesuaian Teknis Tempat Sampah

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kondisi teknis tempat sampah dari setiap Zona yakni sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	90%	5
2	100%	5
3	100%	5
4	100%	5
5	100%	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

4.2. Cakupan Tempat Sampah



Gambar 7. Peta Cakupan Tempat Sampah

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

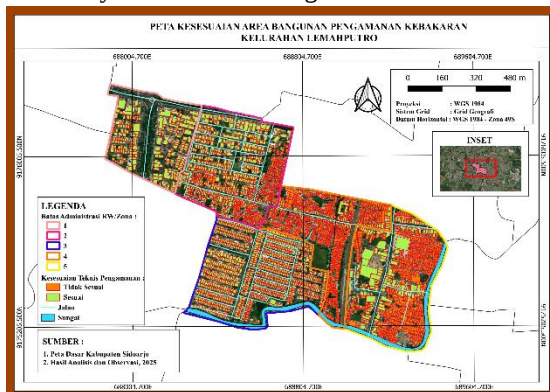
Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor cakupan tempat sampah dari setiap Zona yakni sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	30 m	0
2	49 m	0
3	23 m	0
4	82 m	3
5	108 m (>100 m)	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

5. Kondisi Proteksi Keamanan

5.1. Persyaratan Teknis Pengamanan Kebakaran



Gambar 8. Peta Kesesuaian Teknis Pengamanan Kebakaran

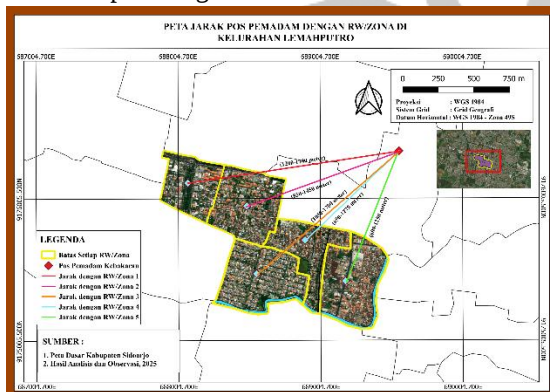
Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan kriteria yang terdapat dalam pedoman serta hasil data yang diperoleh setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh skor kondisi teknis pengamanan kebakaran dari setiap Zona yakni sebagai berikut :

Zona	Hasil Penilaian	Skor
1	0%	0
2	38%	1
3	0%	0
4	89%	5
5	79%	5

Sumber : Hasil Analisis, 2025

5.2. Cakupan Pengamanan Kebakaran



Gambar 8. Peta Cakupan Pengamanan Kebakaran

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan pedoman yang digunakan, penggunaan hydrant bukan menjadi alat yang harus tersedia, apabila terdapat pos pemadam kebakaran yang berjarak kurang dari 5000 meter atau 5 kilometer dari lokasi yang diteliti. Dengan demikian, berikut merupakan jarak antara pos pemadam dan zona di area penelitian:

Zona	Hasil Penilaian
1	1200-1700 Meter
2	830-1450 Meter
3	1050-1700 Meter
4	650-1275 Meter
5	600-1250 Meter

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil data diatas, maka seluruh Zona memiliki jarak kurang dari 5 kilometer, sehingga skor dari keseluruhan Zona adalah 0.

6. Klasifikasi Permukiman Kumuh

Zona	Total Skor	Tingkat Kekumuhan
1	5	Tidak Kumuh
2	8	Rendah
3	5	Tidak Kumuh
4	22	Sedang
5	21	Sedang

Sumber : Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat kekumuhan permukiman di atas, dapat dideskripsikan bahwa terdapat 3 dari 5 Zona yang memiliki skor yang cukup untuk disebut kumuh, yakni Zona 2 dengan skor 8 sehingga masuk dalam kategori tingkat kekumuhan rendah (6-20), lalu Zona 4 dan 5 dengan skor masing-masing yakni 21 dan 22 sehingga termasuk dalam kategori tingkat kekumuhan sedang (21-35).

B. Pembahasan

Dalam lokasi penelitian yaitu kelurahan Lemahputro, setelah dilakukan identifikasi permukiman kumuh dari setiap Zona, diperoleh ada 3 dari 5 Zona yang termasuk kumuh, yakni Zona 2, Zona 4, dan Zona 5.

STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
- Kemudahan dalam akses menuju area sekitarnya, karena area ini berada di pusat kota/kabupaten. - Jarak dengan pos pemadam yang dekat, yakni di bawah 5 km. - Sistem drainase yang mengalir dengan baik, sehingga tidak ada genangan air atau banjir. - Kondisi/kualitas jalan yang cenderung baik/tidak rusak.	- Sebagian area cakupan tempat sampahnya belum memadai - Drainase di sebagian area yang tidak tertutup sepanjang jalan - Terdapat area permukiman yang padat dan jalan yang relatif sempit. - Sebagian besar area padat permukiman dan bangunan tidak teratur.

OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
1. Lokasi yang strategis. Dengan berada di pusat Sidoarjo. 2. Terdapat program KOTAKU untuk menangani permukiman kumuh yang dilaksanakan sejak tahun 2020. 3. Dukungan Pemda terhadap pengentasan lingkungan kumuh.	1. Sebagian besar area padat permukiman dan tidak dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran. 2. Masih maraknya urbanisasi ke wilayah kelurahan Lemahputro. 3. Menurunnya kualitas lingkungan fisik area apabila tidak segera diambil penanganan.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan tabel komponen SWOT yang dimiliki oleh kelurahan Lemahputro, maka dapat dibentuk strategi sebagai berikut :

1. Strategi S-O
 - a. Dengan lokasi yang strategisnya, tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan baik seperti meningkatkan pembangunan dan pengembangan wilayahnya (Ariaoktafiani P., 2024).
 - b. Area dan prasarana yang sudah mendukung, harus terus ditingkatkan agar benar-benar menyeluruh dan mewujudkan area yang semakin baik, dengan mengoptimalkan program pemerintah yang sedang diterapkan. (Rangkuti, dkk., 2023)
2. Strategi W-O
 - a. Meningkatkan kualitas prasarana yang lebih lengkap dan sesuai teknis, dikarenakan masih terdapat beberapa sektor yang memang belum terpenuhi dan sesuai teknis, seperti jalan. (Safarina, dkk., 2023).
 - b. Renovasi dan pengembangan prasarana di sebagian area, salah satunya aksesibilitas bagi pemadam kebakaran, dikarenakan sebagian area tidak dapat diakses karena prasarana yang tidak memadai seperti lebar jalan. (Ariaoktafiani P., 2024).
 - c. Program yang diterapkan harus bisa memberikan solusi atas kondisi yang ada, seperti hal nya kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat sampah, agar sampah dapat dikelola dan dikumpulkan dengan baik tanpa mengotori area sepanjang jalan permukiman (Safarina, dkk., 2023).
3. Strategi S-T
 - a. Jarak dengan pos pemadam yang relative dekat, harus didukung dengan prasarana yang memadai, terutama jalan. Dalam hal ini, pemerintah juga harus bisa mendorong pengembangan wilayah dengan menciptakan

akses yang cukup bagi kendaraan pengamanan (Rangkuti, dkk., 2023).

- b. Kemudahan dalam akses area ini, harus mampu digunakan oleh pemerintah maupun instansi untuk mengembangkan areanya menjadi area dengan permukiman yang berkelanjutan (kondisi fisik lingkungan tetap terjaga) dan masyarakat yang berkualitas (Safarina, dkk., 2023).
- c. Dengan area permukiman yang sudah cukup padat, maka pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan harus bisa mengawasi dan mencatat setiap masyarakat yang menempati area. Supaya tidak mengganggu prasarana yang sudah ada dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar (Rangkuti, dkk., 2023).

4. Strategi W-T

- a. Sebagian area yang tidak teratur, disertai prasarana yang tidak sesuai teknis menjadikan area ini lebih sulit dijangkau oleh pengamanan, salah satunya pemadam. Pemerintah harus mengambil aksi dengan mendirikan pos keamanan bagi warga disertai adanya rehabilitasi akses. (Rangkuti, dkk., 2023).
- b. Pengelolaan terkait tata ruang area disertai dengan pembatasan maupun pengecekan masyarakat yang menetap hingga mendirikan bangunan di area ini harus terus dilakukan oleh pemerintah setempat. (Rangkuti, dkk., 2023) (W-4 dan T-2)
- c. Prasarana yang kurang memadai akan menciptakan lingkungan yang semakin buruk, apabila dibiarkan. Dengan demikian, pemerintah perlu membentuk kelompok swadaya masyarakat yang dapat mengontrol maupun menanggulangi permasalahan yang ada, salah satunya penurunan kualitas lingkungan akibat masyarakat itu sendiri (Safarina, dkk., 2023).

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan identifikasi permukiman kumuh di kelurahan Lemahputro dengan beberapa indikator yang digunakan, serta analisis SWOT dari area yang kumuh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 2) Tingkat kekumuhan di kelurahan Lemahputro terjadi sebagian besar disebabkan oleh teknis dan cakupan sampah dan teknis jalan. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi banyak indikator lainnya, seperti pengamanan kebakaran.
- 3) Strategi dari analisis SWOT dari seluruh area hampir memiliki kesamaan, yakni penataan dan

peningkatan fisik area. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya prasarana yang kurang bahkan tidak sesuai teknis, baik keteraturan bangunan, teknis jalan, teknis drainase, maupun cakupan dan teknis sampah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang tepat dan dapat diterapkan yaitu :

- 1) Masyarakat yang berada dan bermukim di area penelitian, terutama dengan kategori kumuh diharapkan mampu mengelola lingkungan yang ditempatinya dengan lebih baik, baik rumah atau bangunan yang didirikan, penyediaan sampah, maupun pengelolaan drainase. Selain itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan pemerintah guna mengentaskan kekumuhan.
- 2) Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kekumuhan yang terjadi. Dikarenakan apabila dibiarkan, maka kekumuhan tersebut akan menjadi masalah yang kompleks bagi daerah. Pemerintah yang memiliki wewenang harus mampu menerbitkan dan menerapkan aturan-aturan yang mendukung pengentasan kekumuhan. Selain itu, pemerintah juga harus mengontrol pelaksanaan program atau aturan yang direncanakan dan diterapkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., & Novira, N. (2019). Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Denai. *Tunas Geogr*, 8(1), 59.
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (2023). Diakses pada 9 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang Menurut Kecamatan Tahun 2021-2023. Diakses pada 11 Januari 2025.
- Dita, C. Y. E., & Legowo, M. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 1-12).
- Kementerian PUPR (2022). Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh.
- Ariaoktafiani, P. (2024). Strategi Berkelanjutan untuk Transformasi Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Tanjungmas Semarang. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 9(5), 456-467.
- Rangkuti, N. A., Nuraini, C., Millanie, F., & Sugiarto, A. (2023). Strategi Tata Kelola Penanganan Pemukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1426-1432.
- Safarina, T. S., & Damayanti, V. (2023). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 55-64.
- Salim, H. (2023, November). Fenomena Urbanisasi Kota Surabaya (Studi Pertambahan Penduduk Berusia Muda). In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 2, pp. 938-946).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Yunus, H.S. (2010). Metode Penelitian : Wilayah Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka belajar.